



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2013 – 2014
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 10 (sepuluh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Kamis, 12 September 2013
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.10 WIB s.d 16.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V, Ruang KK V
Acara	: Pembahasan persetujuan pemberian tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI
Ketua Rapat	: Drs. Laurens Bahang Dama
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, M.Si.
Hadir Anggota	: dari 56 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 14.10 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, Sekjen Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional pada hari ini adalah pembahasan persetujuan pemberian tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI
3. Ketua Rapat mempersilahkan Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, Sekjen Kementerian Perhubungan, Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Sekretaris Utama BMKG, dan Sekretaris Utama Badan SAR Nasional untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI menyetujui Realokasi/Optimalisasi untuk Tunjangan Kinerja 2013 berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor : SR-414/ MK.02/ 2013, Tanggal: 30 Juli 2013, dan Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SR-499/MK.02/2013 Tanggal 30 Agustus 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, BMKG, dan Basarnas dengan rincian sebagai berikut:

No	Kementerian/ Lembaga	Jumlah Pegawai (orang)	Kebutuhan Anggaran	Realokasi/ Optimalisasi	Tambahan Anggaran Yang Diperlukan
1	Kementerian Pekerjaan Umum	26.405	Rp 403.900.953.000	Rp 50.269.713.000	Rp 353.631.240.000
2	Kementerian Perhubungan	31.820	Rp 485.711.900.100	Rp 218.652.000.000	Rp 267.059.900.100
3	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	553	Rp 12.458.453.700	Rp 12.458.453.700	-
4	BMKG	4.438	Rp 77.776.227.300	Rp 4.931.543.704	Rp 72.844.683.596
5	BASARNAS	3.015	Rp 46.261.043.100	Rp 767.960.000	Rp 45.493.083.100
	TOTAL	66.231	Rp 1.026.108.577.200	Rp 287.079.670.404	Rp 739.028.906.796

Selanjutnya Komisi V DPR RI mendukung tambahan anggaran untuk Tunjangan Kinerja 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas.

2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melakukan peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan program/kegiatannya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB.

Jakarta, 12 September 2013

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,**

TTD

LEON MUHAMAD

**PLT. SEKRETARIS UTAMA
BMKG,**

TTD

P.J. PRIH HARJADI

**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM,**

TTD

AGOE WIDJANARKO

**SEKRETARIS UTAMA
BASARNAS,**

TTD

MAX RULAND B.

KETUA,

TTD

LAURENS BAHANG DAMA

**SEKRETARIS
KEMENTERIAN PDT,**

TTD

H.M. NURDIN